

**PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI, ASIMETRI INFORMASI DAN MORALITAS
TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI**
(Studi empiris pada SKPD Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

RIAN PUTRA ZILMY

2008/ 05274

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

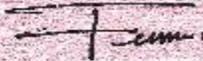
PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI, ASIMETRI INFORMASI DAN MORALITAS TERHADAP KECONDONGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang)

Nama : Rian Putra Zilmy
BP/NAM : 2008/05174
Program Studi : Akuntansi
Kebangsaan : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2013

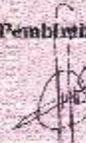
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Charoline Chekyvanry, SE, M.Ak
NIP. 19891019 200604 2 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertimbangkan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Kesesuaian Kompetensi, Asimetri Informasi, dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)

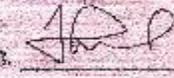
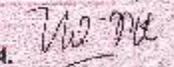
Nama : Rian Putra Zilmy

BP/NIM : 2008/05274

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Charoline Chelsvianny, SE, M.Ak	2. 
3. Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	4. 

ABSTRAK

Rian Putra Zilmy (05274) : Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

**Pembimbing : 1. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
2. Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1) Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, 2) Pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan 3) Pengaruh moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*, dengan jumlah responden 84. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing Kepala Bagian Keuangan dan Staf Keuangan pada setiap SKPD. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science (SPSS)*.

Hasil penelitian membuktikan bahwa 1) Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,423 > 1,6686$. Nilai koefisien β variabel X_1 negatif sebesar $-0,262$ yang berarti (H_1 diterima), 2) Asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,929 > 1,6686$. Nilai koefisien β variabel X_2 positif sebesar $0,315$ yang berarti (H_2 diterima) dan 3) Moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,006 > 1,6686$. Nilai koefisien β variabel X_3 negatif sebesar $-0,313$ yang berarti (H_3 diterima)

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Dari hasil penelitian ini pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem kompensasi, moralitas dan memperhatikan perbedaan informasi dalam pencatatan akuntansi agar tingkat kecurangan akuntansi dapat terus dikurangi bahkan dapat dihilangkan, 2) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode wawancara langsung dengan responden, sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya, 3) Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan judul yang sama sebaiknya menambahkan dan menggunakan variabel lain, karena dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan dapat menjelaskan sebesar 28,9%.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, dan arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak dan Ibu pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemko Padang yang telah membantu penulis dengan memberikan data penelitian.
5. Kedua Orang Tua (Ayahanda Zilmy Zainal dan Ibunda Faiza Muchlis), adik-adik (Ricky dan Fachrie), yang selalu menemani (Ayu Nanda Martina) beserta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, do'a tulus ikhlas serta dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2008.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	11
1. Kecurangan	11
a. Pengertian Kecurangan	11
b. Faktor-faktor Kecurangan	13
c. Unsur-unsur Kecurangan	15
d. Jenis-jenis Kecurangan	17

e. Kecurangan Akuntansi	18
2. Kesesuaian Kompensasi.....	21
a. Pengertian.....	21
b. Tujuan Manajemen Kompensasi	24
c. Komponen-komponen Kompensasi	26
d. Metode Kompensasi	27
3. Asimetri Informasi	28
a. Pengertian	28
b. Bentuk Asimetri Informasi.....	30
c. Tipe Asimetri Informasi.....	31
4. Moralitas	32
a. Pengertian	32
b. Jenis-Jenis Moral	35
c. Tahapan Moral	36
d. Pentingnya Moral	37
e. Dampaknya Moral	38
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Hubungan Antar Variabel	42
D. Kerangka Konseptual	48
E. Hipotesis.....	49
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50

B. Populasi, Sampel dan Responden	50
C. Jenis Dan Sumber Data	52
D. Metode Pengumpulan Data	52
E. Variabel Penelitian	53
F. Instrumen Penelitian	53
G. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	57
H. Hasil Uji Coba Instrumen	58
I. Uji Asumsi Klasik	59
J. Teknik Analisis Data	60
K. Definisi Operasional	64
BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	66
B. Demografi Responden.....	67
C. Statistik Deskriptif	71
D. Deskripsi Variabel Penelitian.....	72
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	79
F. Uji Asumsi Klasik	81
G. Analisis Data	84
H. Pembahasan	89
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama dan Alamat SKPD Kota Padang	51
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	54
3. Daftar Skor.....	56
4. Nilai <i>Cronbach's Alpha Corrected dan Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian	59
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	67
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	68
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Pendidikan.....	69
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	70
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	70
10. Statistik Deskriptif	71
11. Distribusi Frekuensi Variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	72
12. Distribusi Frekuensi Variabel Kesesuaian Kompensasi	74
13. Distribusi Frekuensi Variabel Asimetri Informasi.....	76
14. Distribusi Frekuensi Variabel Moralitas	78
15. Nilai <i>Corrected Item-Total Corelation</i> Terkecil.....	79
16. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian	80
17. Uji Normalitas Residual.....	81
18. Uji Multikolinearitas	82
19. Uji Heterokedastisitas	83
20. Uji F (<i>F-Test</i>)	84
21. Uji Koefisien Determinasi	85
22. Koefisien Regresi Berganda.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen P-LOT Test
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian
4. Statistik Deskriptif
5. Uji Normalitas, Uji Multikoleniaritas, Uji heterokedastisitas
6. Uji F (*F-Test*)
7. Uji Koefisien Determinasi
8. Koefisien Regresi Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia, kecurangan akuntansi telah berkembang secara luas yang menimbulkan kerugian yang sangat besar hampir diseluruh sektor. Kasus kecurangan akuntansi di Indonesia terjadi secara berulang-ulang. Media massa banyak memberitakan hal tersebut sehingga bagi masyarakat kasus kecurangan akuntansi sepertinya bukan rahasia lagi. Pada sektor publik kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diajukannya manajemen BUMN ke pengadilan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggaraan pemilu, dan DPRD. Di sektor swasta kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank (Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bapindo, Bank Exim di marger menjadi Bank Mandiri. Bank Pikko, Bank Denpac, Bank CIC di marger menjadi Bank Century. Bank Niaga, Bank Lippo di marger menjadi Bank CIMB Niaga),

Persaingan dalam dunia pemerintah yang dilandasi oleh nuansa politik telah mempengaruhi pimpinan pemerintah melakukan kecurangan (*fraud*), banyak pemicu seseorang untuk melakukan kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Pimpinan-pimpinan pemerintahan banyak yang memanfaatkan wewenang yang dimilikinya untuk melakukan praktik kecurangan. Kecurangan akuntansi dapat kita lihat dari penyajian laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang disajikan

tidak sesuai dengan fakta dan bersifat material yang diketahui tidak benar dan dilakukan secara sengaja dengan maksud menipu maka dapat dikatakan sebagai kecurangan akuntansi. Umumnya, kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk dari kecurangan akuntansi.

Kecurangan pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arens (2004), yang menyatakan bahwa kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Menurut Marwick (1993) dalam Aviora (2008) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi antara lain: a) Keefektifan pengendalian intern, b) Motivasi, c) moralitas, d) Kesesuaian Kompensasi.

Ikatan Akuntan Indonesia seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai :

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan

2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Nur (1994) cenderung merupakan condong, memihak, tidak tegak lurus, miring kesebelah, sehingga kecenderungan kecurangan akuntansi secara umum dapat diartikan suatu sikap condong, terdorong, memihak, kearah untuk melakukan tindakan, manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan secara sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, dan terdapatnya salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi untuk memberikan manfaat/kerugian di luar maupun di dalam organisasi.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, ada 3 bentuk kecurangan yang diistilahkan dengan *fraud tree*, yaitu *Corruption* (korupsi), *Asset Misappropriation* (pengambilan aset secara ilegal), dan *Fraudulent Statemens* (pernyataan palsu atau salah pernyataan). Dari tiga bentuk kecurangan tersebut di atas maka pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi.

Kecenderungan kecurangan akuntansi juga dapat dipicu dan dipengaruhi oleh faktor organisasi (eksternal) dan faktor dalam diri individu (internal) sebagai pelaku kecurangan itu sendiri, menurut teori GONE dalam Simanjuntak (2008) terdapat empat faktor seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu : *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) dan *Exposure*

(pengungkapan). *Opportunity* dan *Exposure* berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). Faktor generik berhubungan dengan organisasi yang berbuat kecurangan dapat dipengaruhi kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi. Sedangkan *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut dengan faktor individual). Faktor individual berhubungan dengan perilaku yang melekat dari individu itu sendiri, dalam kaitannya faktor individu ini berhubungan dengan moralitas untuk melakukan kecurangan.

Pemberian kompensasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kompensasi menurut Hasibuan (2003) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Salah satu akibat fatal dari ketidaksesuaian kompensasi adalah kecurangan akuntansi. Manajemen maupun individu melakukan perilaku menyimpang dari tujuan organisasi yang ditutupi dengan penyajian yang tidak konsisten dalam laporan keuangan, misalnya pencurian kas, memanipulasi catatan, kebutuhan untuk berhasil dan mempertahankan jabatan, menyebabkan manajemen melakukan penipuan dalam melaporkan pencatatan akuntansi. Dalam Amin (1992) mengatakan bahwa pencegahan kecurangan akuntansi dapat dilakukan salah satunya melalui memberikan insentif/benefit yang cukup memadai.

Menurut Amin (2009), pemberian kompensasi yang tidak sesuai terhadap pegawai dapat mengarah kepada perlakuan yang tidak semestinya terhadap kas. Seorang pegawai yang memiliki masalah keuangan bisa menyalahgunakan kas

atau uang yang ada di tangannya. Kewajiban keuangan pribadi dapat menimbulkan tekanan bagi seseorang untuk melakukan tindakan pencurian atau menyalahgunakan aktiva/kas yang merupakan salah satu bentuk kecurangan akuntansi.

Selanjutnya asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana *agent* memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak *principal*. Asimetri informasi muncul ketika *agent* lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan *principal* dan *stakeholder* lainnya. Anthony dan Govindarajan (2001), menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (*agency theory*), yaitu *principal* (pemilik/atasan) memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya.

Hal ini juga terjadi di pemerintahan disaat proses penyusunan anggaran pemerintah daerah, teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi dimana eksekutif mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuan, yang berpotensi menciptakan *moral hazard* dan *adverce selection*, asimetri informasi terjadi karena legislatif tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja eksekutif, legislatif tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha eksekutif memberikan kontribusi pada hasil aktual pada suatu organisasi pemerintahan

Bawahan memiliki informasi yang lebih banyak tentang kapabilitas produksi mereka dibandingkan atasan. Ditinjau dari perspektif keagenan, asimetri informasi ini memotivasi bawahan untuk memberikan informasi yang

menyesatkan tentang kapabilitas produksi mereka. Schiff dan Lewin (1970) dalam Komala Sari (2004) mengatakan apabila atasan mengizinkan bawahan untuk berpartisipasi dalam penetapan anggaran, dapat digunakan sebagai alat menjanging informasi privat yang dimiliki bawahan. Dalam sektor publik asimetri informasi sering terjadi antara anggota legislatif (DPRD) dengan pemerintah.

Teori Gone dalam wahyudi (2006) kecenderungan kecurangan juga berasal dari dalam diri individu itu sendiri, salah satunya moralitas. Menurut Bertens (1993), moralitas berasal dari kata sifat lain "*moralis*" mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan dengan moral. Moralitas yaitu suatu perbuatan atau perilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan teori Gone diatas, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *Greed* (keserakahan). Dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang, sifat pribadi yang rakus, sudah punya satu bukit, masih ingin bukit yang lainnya, ketika harta menjadi jembatan menuju kekuasaan, orang terdorong untuk melakukan apa saja untuk menggapainya, termasuk dengan cara melakukan kecurangan.

Sebuah study CFE (1996) dalam James (2004) seorang individu dengan tingkat integritas tinggi dan tekanan (kebutuhan) serta kesempatan terbatas untuk melakukan kecurangan cenderung bersifat jujur, sebaliknya individu yang integritas pribadinya kurang, ketika ditempatkan dalam situasi tekanan kebutuhan meningkat dan diberikan kesempatan cenderung melakukan kecurangan asalkan kebutuhannya terpenuhi. Dalam Amin (1992) alasan yang melatar belakangi kecurangan manajemen adalah manajer tidak mengindahkan moral

(*unscrupulous*) mungkin membantu kepentingan yang bertentangan. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik manusia yang paling mungkin melakukan kecurangan, pemerintahan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi.

Kinerja Pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat khususnya dalam mengelola dana publik. Pada tahun 2012, BPK RI Perwakilan Sumatera Barat kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada empat kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Empat daerah kabupaten/kota itu adalah Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Betty Ratna Nuraini menyebutkan opini WDP diberikan karena masih banyak temuan yang tidak wajar atas penggunaan anggaran negara dan kinerja beberapa SKPD di empat kabupaten/kota tersebut pada tahun 2011. Untuk Kota Padang, terdapat temuan para beberapa Kepala SKPD yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi sebesar Rp421 juta dan 7 bendahara SKPD memberikan laporan yang belum valid senilai Rp186,2 juta. "Temuan yang tersebut melalui proses uji dan analisis dari BPK RI Perwakilan Sumbar atas hasil Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah Daerah masing-masing," kata Betty Ratna Nuraini. (Harian Haluan, Kamis, 21 Juni 2012). Dari fakta di atas terdapat dugaan bahwa kepala SKPD menyalahgunakan wewenangnya menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, dan beberapa bendahara SKPD yang

memberikan laporan yang tidak sesuai atau belum valid yang merupakan salah satu bentuk kecurangan akuntansi.

Meski kecurangan akuntansi diduga sudah lama berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dimana kecurangan akuntansi umumnya dipergunakan untuk melakukan korupsi, hal yang lazim dilakukan adalah manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark up yang merugikan perekonomian negara. Namun di Indonesia, belum pernah dilakukan kajian teoritis dan empiris secara komprehensif dalam upaya pencegahannya, fenomena ini tidak dapat dikaji oleh ilmu akuntansi saja, tetapi perlu melibatkan disiplin ilmu yang lain karena efektivitas ketentuan hukum tidak dapat dicapai apabila tidak didukung norma dan nilai etika dari pihak terkait. Terbukti tindakan yang dilakukan pemerintah selama ini sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindakan kecurangan di Indonesia untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang signifikan karena belum memberikan efek jera kepada pelaku.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wilopo pada tahun 2005 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Studi Pada Perusahaan Terbuka dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian Wilopo (2005) adalah variabel bebas keefektifan pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturaan akuntansi, asimetri informasi, moralitas manajemen, serta variabel terikat perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Dimana pada penelitian Wilopo yang dijadikan sampel adalah Perusahaan terbuka

dan BUMN diseluruh Indonesia dengan metode pengambilan sampel adalah Stratified Random Sampling, yaitu mengelompokan perusahaan berdasarkan sembilan sektor usaha. Sehingga peneliti melihat adanya kelemahan yaitu ada kemungkinan tidak terambilnya sampel secara merata yang mewakili setiap daerah di Indonesia, selain itu perbedaan penelitian ini juga terdapat pada teori yang digunakan pada penelitian Wilopo bertolak dari teori keagenan (agency theory) sedangkan pada penelitian ini peneliti menambahkan teori GONE.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengurangi tindakan kecurangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : **“Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Padang”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Se jauh mana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Se jauh mana pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Se jauh mana pengaruh moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Pengaruh moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademis, penelitian ini untuk mendalami dan memperluas pengetahuan tentang pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Bagi Praktisi hukum, penelitian ini untuk menambah dan memberikan gambaran pengetahuan mengenai kecurangan akuntansi. Sehingga tidak salah dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan.
3. Bagi peneliti, dapat mengetahui dan menambah wawasan tentang tingkat kecurangan akuntansi yang dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti kesesuaian kompensasi, asimetri informasi, dan moralitas.
4. Bagi penelitian selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang memadai dalam melakukan dan melanjutkan penelitian yang sejalan dan memperluas penelitian ini dengan menambah atau mengkombinasikan variabel-variabel penelitian untuk mencapai hasil yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kecurangan

a. Pengertian Kecurangan

Kecurangan menurut *The Institute Of Internal Auditor* Amerika dalam Amin (1992) mendefenisikan kecurangan mencakup suatu kesatuan ketidakberesan (*irregulations*) dan tindakan *illegal* yang bercirikan penipuan yang disengaja, ia dapat dilakukan untuk manfaat dan/atau kerugian organisasi oleh orang diluar atau didalam organisasi.

Menurut *Institute of internal auditor* dalam Sawyer (2006) Kecurangan adalah serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan illegal yang sengaja dilakukan untuk menipu, kecurangan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan uang, kekayaan, atau jasa untuk menghindari pembayaran/kerugian jasa atau untuk mengamankan keuntungan pribadi perusahaan. Menurut Sawyer (2006) melakukan kejahatan dengan penipuan memiliki banyak istilah antara lain disebut kecurangan, kejahatan kerah putih (*while collar crime*) dan penggelapan.

Kecurangan adalah serangkaian tindakan tidak wajar dan illegal yang sengaja dilakukan untuk menipu, tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun didalam organisasi.

Kejahatan kerah putih adalah tindakan yang dilakukan dengan cara-cara non fisik melalui penyembunyian atau penipuan untuk mendapatkan uang/harta benda, untuk menghindari pembayaran, untuk mendapatkan keuntungan bisnis dan pribadi.

Penggelapan adalah konversi secara tidak sah untuk kepentingan pribadi harta benda yang secara sah berada dibawah penguasaan pelaku kejahatan, penggelapan tidak meliputi tindakan-tindakan kriminal seperti penyuapan, pencurian kecurangan terhadap pemerintah, memperoleh harta benda melalui ancaman kekerasan.

Definisi kecurangan menurut *Black Law Dictionary* dalam Wahyudi (2009) adalah :

1. *A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime.*
2. *A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act.*
3. *A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.*

Yang diterjemahkan (tidak resmi), kecurangan adalah :

1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan

yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan, namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan;

2. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat;
3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikan.

b. Faktor-Faktor kecurangan:

Menurut Singleton (2006) dalam Murniati (2008), terdapat 3 faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan sebutan "*fraud triagle*" sebagai berikut:

1) *Pressure* (Tekanan)

Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan, misalnya tekanan karena dia memiliki utang atau tekanan untuk dapat memperbaiki posisinya di perusahaan.

2) *Opportunity* (Kesempatan)

Kecurangan dapat terjadi jika ada kesempatan untuk melakukan kecurangan perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki pengendalian intern yang efektif, kesempatan untuk melakukan kecurangan terbuka

lebar. Tapi dengan pengendalian intern yang memadai akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan atau godaan para pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan.

3) *Rationalization* (Rasionalisasi)

Para pelaku kecurangan menganggap bahwa kecurangan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka melakukan kecurangan dan beranggapan bahwa mereka hanya mengambil sedikit saja atau meminjam harta perusahaan dan tidak merugikan perusahaan.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori GONE menyebutkan kecurangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1) *Greed* (Keserakahan)

Menurutnya semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas, jadi kecurangan timbul karena keserakahan dalam diri seseorang.

2) *Opportunity* (Kesempatan)

Setiap orang di dalam perusahaan mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan, kecurangan pada umumnya didorong oleh kesempatan tanpa adanya kesempatan kecurangan tidak akan terjadi.

3) *Need* (Kebutuhan)

Setiap orang mempunyai kebutuhan materi yang dapat menjadi pendorong terjadinya kecurangan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang melakukan apa saja asalkan kebutuhannya terpenuhi sekalipun melakukan kecurangan.

4) *Exposure* (Pengungkapan)

Karena tidak adanya tindakan atau konsekuensi kepada pelaku kecurangan terutama dalam hal pengungkapan kecurangan yang telah terjadi, maka hal ini akan mendorong seseorang melakukan kecurangan yang sama.

c. Unsur-unsur Kecurangan

Dari beberapa definisi atau pengertian kecurangan yaitu salah satunya menurut Amin (1992) dijelaskan unsur-unsur kecurangan secara umum, dari pengertian tersebut tergambar bahwa yang dimaksud dengan kecurangan adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi) adalah:

- 1) Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*);
- 2) Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*);
- 3) Fakta bersifat material (*material fact*);
- 4) Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- 5) Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi;
- 6) Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*); yang merugikannya (*detriment*).

Menurut James A Hall (2001) kecurangan menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat material secara salah yang dilakukan oleh suatu pihak

ke pihak lain, dengan tujuan untuk membohongi dan mempengaruhi pihak lain untuk bergantung pada fakta tersebut, fakta yang akan merugikan. Menurut hukum yang berlaku suatu tindakan curang (*fraudulent act*) harus memenuhi 5 kondisi :

- 1) Penyajian yang salah, harus terdapat laporan yang salah/tidak diungkapkan.
- 2) Fakta yang sifatnya material, suatu fakta harus merupakan faktor yang substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak.
- 3) Tujuan harus terdapat tujuan untuk menipu/pengetahuan bahwa laporan tersebut salah.
- 4) Ketergantungan yang dapat dijustifikasi, penyajian salah harus merupakan faktor substansial yang menyebabkan pihak lain merugi karena bergantungnya.
- 5) Perbuatan tidak adil atau kerugian, kebohongan tersebut menyebabkan ketidakadilan/kerugian bagi korban kecurangan.

Kecurangan disini juga termasuk (namun tidak terbatas pada) manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan.

d. Jenis-Jenis Kecurangan:

Association Of Certified Fraud Examinations (ACFE-2000), dalam Wahyudi (2009) salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

a. Kecurangan Laporan Keuangan (*financial statement fraud*),

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor, kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

b. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulentdisbursement*).

c. Korupsi (*corruption*)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut *ACFE*, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan KPK di Indonesia. Menurut *ACFE*, korupsi terbagi kedalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuit*), dan pemerasan (*economic extortion*)

e. Kecurangan Akuntansi

Ikatan Akuntan Indonesia seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai :

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut William (1996), kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) terdiri dari tindakan-tindakan seperti:

- 1) Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan Laporan keuangan
- 2) Representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan
- 3) Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Menurut Alison (2006) dalam artikel yang berjudul *Fraud Auditing* mendefinisikan kecurangan akuntansi sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Alison (2006) mengatakan dalam artikel yang berjudul *Fraud Auditing*, dilihat dari pelaku kecurangan maka secara garis besar kecurangan dapat digolongkan menjadi dua jenis :

1. Manajemen untuk kepentingan organisasi, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*). Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena adanya dorongan dan ekspektasi terhadap kinerja organisasi. Salah saji yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah *irregulatities* (ketidakberesan). Bentuk kecurangan seperti ini seringkali berupa : manipulasi, pemalsuan, atau perubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan, kesengajaan dalam salah menyajikan atau sengaja menghilangkan (*intentional*

omissions) suatu transaksi, kejadian, atau informasi penting dari laporan keuangan.

2. Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (*misstatements arising from misappropriation of assets*). Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh pegawai yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. Contoh salah saji jenis ini adalah :
 - a) Penggelapan terhadap penerimaan kas.
 - b) Pencurian aktiva.
 - c) Mark-up harga.
 - d) Transaksi tidak resmi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui kecurangan akuntansi merupakan tindakan, manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan secara sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, dan terdapatnya salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi, untuk memberikan manfaat/kerugian di luar maupun di dalam organisasi.

2. Kesesuaian Kompensasi

a. Pengertian Kompensasi

Secara umum kompensasi merupakan sebagian kunci pemecahan bagaimana membuat anggota berbuat sesuai dengan keinginan organisasi. Kompensasi yang sesuai akan membantu menciptakan kemauan diantara orang-orang yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan melakukan tindakan yang diperlukan organisasi. Secara umum berarti bahwa karyawan harus merasa bahwa dengan melakukannya, mereka akan mendapatkan kebutuhan penting yang mereka perlukan. Dimana didalamnya termasuk interaksi sosial, status, penghargaan, pertumbuhan dan perkembangan.

Menurut Handoko, “Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi (Handoko, 2003)” Dengan kata lain, berangkat dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja dengan menjual tenaga, pikiran dan juga waktu yang dimilikinya kepada perusahaan dengan harapan mendapatkan kompensasi (imbalan).

“Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka (Handoko, 2003)” Jadi melalui kompensasi tersebut karyawan dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja serta meningkatkan kebutuhan hidupnya.

Masalah kompensasi bukan hanya penting karena merupakan dorongan utama seseorang menjadi karyawan, tapi juga besar pengaruh

terhadap semangat, perilaku dan kegairahan kerja para karyawan. Dengan demikian maka setiap organisasi harus dapat menetapkan kompensasi yang paling tepat, sehingga dapat menopang mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien. Seberapa besar kompensasi diberikan harus sedemikian rupa sehingga mampu mengikat para karyawan. Hal ini sangat penting sebab bila komponen yang diberikan kepada para karyawan terlalu kecil bila maka hal ini dapat menyebabkan karyawan melakukan perilaku menyimpang dari tujuan organisasi.

Menurut Veithzal (2006), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan. Sedangkan menurut Griffin (2004), kompensasi adalah *remunerasi financial* yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka.

Hasibuan (2005) mengatakan bahwa, kompensasi adalah semua pendapatan berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang artinya kompensasi dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan sedangkan kompensasi berupa barang artinya kompensasi dibayar dengan barang.

Menurut William dan Keith dalam Hasibuan (2005), kesesuaian kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima yang sesuai sebagai balasan dari pekerjaan yang telah diberikannya. Sedangkan menurut F.Sikula dalam Hasibuan (2005), kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa.

Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik harus dihitung dan diberikan kepada pekerja sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi/perusahaan tempai ia bekerja. Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil. Sistem tersebut umumnya berisi kriteria penilaian setiap pegawai yang ada misalnya mulai dari jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, kecepatan kerja, komunikasi dengan pekerja lain, pengetahuan atas pekerjaan dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui kesesuaian kompensasi adalah nilai/*value* yang diterima oleh pegawai atau karyawan yang sesuai dengan apa yang telah diberikannya kepada organisasi dengan melihat hasil dari penghitungan kinerja pegawai atau karyawan tersebut. Bisa juga diartikan sebagai hak yang harus diterima oleh pegawai atau karyawan atas kewajiban yang telah dikerjakannya berdasarkan nilai standar yang telah ditetapkan.

Menurut Veithzal (2006), kompensasi yang diberikan kepada karyawan terdiri dalam dua bentuk yaitu :

1) Kompensasi yang bersifat *financial*

Bentuk kompensasi ini ada dua macam, yaitu :

- a. Kompensasi langsung, terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, atau komisi.
- b. Kompensasi tidak langsung atau benefit, terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi *financial* langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan, dan sebagainya.

2) Kompensasi yang bersifat *non financial*

Bentuk kompensasi ini seperti pujian, menghargai diri sendiri, promosi jabatan, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, produktifitas, dan kepuasan.

b. Tujuan Manajemen Kompensasi

Secara umum, tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan akan dikompensasi secara adil dengan membandingkan pekerjaan yang sama di pasar kerja. Namun, tujuan kompensasi yang efektif meliputi :

- a) Memperoleh SDM yang berkualitas
- b) Mempertahankan karyawan yang ada
- c) Menjamin keadilan

- d) Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan
- e) Mengikuti aturan hukum
- f) Meningkatkan efisiensi administrasi

Sedangkan menurut Hasibuan (2005), tujuan pemberian kompensasi dibedakan atas delapan macam yaitu :

- 1) Sebagai ikatan kerja sama
- 2) Kepuasan kerja
- 3) Motivasi
- 4) Stabilitas karyawan
- 5) Disiplin
- 6) Pengaruh serikat buruh
- 7) Pengaruh pemerintah

Kompensasi adalah suatu bagian penting dan kompleks dalam hubungan karyawan dan organisasi. Kompensasi dapat diperlukan untuk menyediakan karyawan dengan alasan untuk mempertahankan suatu standar hidup yang layak. Akan tetapi diluar titik ini, kompensasi juga menyediakan suatu pengukuran berwujud mengenai nilai individu bagi organisasi. Jika karyawan tidak cukup mendapatkan penghasilan untuk memenuhi tujuan ekonomi dari mereka, mereka akan mencari pekerjaan di tempat lain. Demikian pula jika mereka percaya bahwa kompensasi mereka dinilai rendah, mereka mungkin akan melakukan kebiasaan pekerjaan yang buruk, moral yang rendah dan komitmen yang sedikit terhadap organisasi.

c. Komponen-komponen Kompensasi

Menurut Griffin (2004), ada tiga bentuk dasar kompensasi yaitu :

- 1) Upah (*wages*) adalah kompensasi perjam yang dibayarkan kepada karyawan operasional.
- 2) Gaji (*salary*) adalah komponen yang dibayarkan untuk kontribusi total, sebagai ganti dari pekerjaan yang dilakukan berjam-jam.
- 3) Insentif (*incentives*) mencerminkan kesempatan kompensasi khusus yang biasanya terkait dengan kinerja. Komisi dan bonus merupakan insentif yang paling umum.

Sedangkan menurut Veithzal (2006), komponen-komponen kompensasi terdiri atas 4 macam. komponen tersebut yaitu :

a. Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan fikiran dalam mencapai tujuan perusahaan.

b. Upah

Upah merupakan imbalan financial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan dan besarnya dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan.

c. Insentif

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.

d. Kompensasi tidak langsung (*Fringe Benefit*)

Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya, berupa fasilitas-fasilitas, seperti asuransi, tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain.

Hasil penelitian Wilopo (2006) memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, pemberian kompensasi yang sesuai pada perusahaan BUMN di Indonesia tidak secara signifikan menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi dari manajemen perusahaan.

d. Metode Kompensasi

Menurut Hasibuan (2005), metode kompensasi (balas jasa) ada dua yaitu ;

1) Metode tunggal

Yaitu suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Jadi tingkat golongan dan gaji seseorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standarnya.

Misalnya : pegawai negeri ijazah formal S-1, maka golongannya ialah III-A, dan gajinya adalah gaji pokok III-A untuk setiap pegawai sama.

2) Metode Jamak

Yaitu suatu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Jadi standar gaji pokok yang pasti tidak ada. Biasanya terdapat pada perusahaan swasta yang didalamnya masih sering terjadi diskriminasi.

3. Asimetri Informasi

a. Pengertian Asimetri Informasi

Asimetri informasi yaitu perbedaan informasi di mana atasan (*principal*) tidak memiliki cukup informasi dibanding dengan bawahan (*agent*) atau sebaliknya. Asimetri informasi di pemerintahan sering terjadi seperti anggota legislatif (DPRD) selaku manajemen puncak memiliki lebih banyak informasi dibanding bawahan (Pemerintah) selaku manajer pusat pertanggungjawaban (MPP), maka akan muncul tuntutan yang lebih besar dari atasan kepada bawahan/MPP tentang pencapaian target yang kemungkinan sangat sulit dicapai oleh MPP. Sebaliknya apabila bawahan/MPP memiliki lebih banyak informasi dibanding manajemen puncak/atasan maka bawahan/MPP cenderung membuat target yang lebih rendah dari target tertinggi yang bisa dicapai.

Anthony dan Govindarajan (2005), menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (*agency theory*), yaitu *principal* (pemilik/atasan) memberikan wewenang kepada agen (manajer/bawahan) untuk mengatur perusahaan yang dimilikinya.

Pendelegasian wewenang akan menyebabkan manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih mengetahui prospek dan informasi perusahaan sehingga menimbulkan ketidak seimbangan informasi antara manajer dengan pemilik yang disebut asimetri informasi.

Teori keagenan menunjukkan bahwa asimetri informasi mungkin dapat merubah tingkat partisipasi menuju terjadinya senjangan anggaran. Asimetri informasi muncul ketika agen memiliki informasi yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan antara agen dan principal (Baiman & Evans, 1983; Penno, 1984; Coughlan & Schmidt, 1985). Magee (1980) dalam Falikhatun (2007) menyatakan bahwa, hasil yang diharapkan seorang atasan dapat ditingkatkan dengan akses terhadap informasi pribadi bawahan. Atasan mungkin mempunyai pengetahuan yang lebih dari pada bawahan mengenai unit tanggung jawab bawahan, maupun sebaliknya. Bila kemungkinan yang pertama terjadi, akan muncul tuntutan yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai pencapaian target anggaran yang menurut bawahan terlalu tinggi. Namun bila kemungkinan yang kedua terjadi, bawahan akan menyatakan target lebih rendah dari pada yang dimungkinkan untuk dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan lebih dari pada yang lainnya terhadap sesuatu hal disebut asimetri informasi.

Baiman (1982), Chow *et.al* (1988), Blanchard & Chow (1983) dan Waller (1988) Dalam Falikhatun (2007) menyatakan bahwa di

beberapa organisasi, bawahan memiliki informasi lebih akurat yang dapat mempengaruhi pengukuran kinerja dibandingkan atasannya. Baiman dan Evans (1982) menyarankan agar bawahan yang memiliki informasi pribadi mengenai perusahaan ikut berpartisipasi sesuai dengan sistem pengendalian manajemen dengan menyampaikan atau meyertakan informasi pribadinya untuk dipadukan dengan standar anggaran perusahaan dalam rangka penetapan kinerja perusahaan

b. Bentuk Asimetri Informasi

Ada dua macam bentuk asimetri informasi, yaitu:

i. Asimetri informasi vertikal

Yaitu informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (atasan). Setiap bawahan dapat mempunyai alasan yang baik dengan meminta atau memberi informasi kepada atasan.

ii. Asimetri informasi horizontal

Yaitu informasi yang mengalir dari orang ke orang dan jabatan yang sama tingkat otoritasnya atau informasi yang bergerak diantara orang-orang dan jabatan-jabatan yang tidak menjadi atasan maupun bawahan satu dengan yang lainnya dan mereka menempati bidang fungsional yang berbeda dalam organisasi tapi dalam level yang sama.

c. Tipe Asimetri Informasi

Menurut Scott (2000) dalam Rahmawati (2006) membagi dua tipe asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

1. Adverse Selection

Adverse Selection adalah jenis asimetri informasi yang mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan/akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insider*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan dari pada para investor luar.

2. Moral Hazard

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi yang mana satu pihak atau lebih yang menghasilkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka, sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

4. Moralitas

a. Pengertian Moral

Moralitas memiliki dua makna utama:

- * Dalam "deskriptif" arti, moralitas mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat-istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah dalam masyarakat manusia. Menggambarkan moralitas dalam cara ini tidak membuat klaim tentang apa yang secara objektif benar atau salah, tetapi hanya mengacu pada apa yang dianggap benar atau salah oleh seorang individu atau sekelompok orang (seperti agama).
- * Dalam arti yang "normatif", moralitas merujuk langsung ke apa yang benar dan salah, terlepas dari apa yang individu-individu tertentu berpikir. Hal ini dapat didefinisikan sebagai perilaku orang yang ideal dalam situasi tertentu. Ini penggunaan istilah itu dicirikan oleh "definitif" pernyataan seperti "Orang itu adalah bertanggung jawab secara moral" dari pada pernyataan deskriptif seperti "Banyak orang yang percaya kepada orang yang bertanggung jawab secara moral." Ide-ide dieksplorasi dalam etika normatif. Rasa normatif moralitas sering ditantang oleh nihilisme moral (yang menolak keberadaan dari setiap kebenaran moral) dan didukung oleh realisme moral (yang mendukung keberadaan kebenaran moral).

Menurut Bertens (1993), moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “*moral*”, kita berbicara “*moralitas suatu perbuatan*” artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Nurdin (2001) moral berarti ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila. Sedangkan bermoral adalah mempunyai pertimbangan baik buruk, berakhlak baik. Selanjutnya dikatakan bahwa, kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiaannya pada hatinya sendiri. Moralitas merupakan pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak. Moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia. Moral murni disebut juga hati nurani.
2. Moral terapan, adalah moral yang didapat dari ajaran berbagai ajaran filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia.

Menurut Drafke dan Kossen (1998) dalam Haris (2009) mendefinisikan moral :

Morale is employee's attitudes toward either their employing organizations in general or towards specific job factors, such as supervision, fellow employees, and financial incentive: it can be ascribed to either the individual or to the group of which he or she is apart.

Dalam hal ini Drake dan Kossen mengatakan bahwa moral kerja mengacu pada sikap-sikap karyawan baik terhadap organisasi-organisasi yang mempekerjakan mereka maupun terhadap faktor-faktor, seperti supervisi, sesama karyawan, dan rangsangan-rangsangan keuangan, ini dapat dianggap bersifat baik dari individu maupun kelompok yang merupakan bagian dimana karyawan berada.

Menurut Amrizal (2004), moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan, jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Menurut Amrizal (2004), dalam suatu organisasi perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan salah tersebut, bahkan dipandang sudah hal yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya dapat merusak bahkan menghancurkan organisasi.

Menurut Cressey dalam Tuanakotta (2007), untuk meneliti para pegawai yang mencuri uang perusahaan (*embezzlers*) yang merupakan perbuatan kecurangan, ia mewawancarai 200 orang yang dipenjarakan karena kecurangan. Cressey menemukan bahwa adanya *violation of ascribed obligation*, artinya melanggar suatu pedoman kerja atau lebih dikenal

dengan penyalahgunaan jabatan merupakan salah satu perbuatan kecurangan yang disebabkan moral seseorang.

Sedangkan menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE* menyebutkan bahwa kecurangan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya keserakahan (*Greed*). Keserakahan berhubungan dengan moral seseorang, menurutnya semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia mempunyai sifat yang tidak pernah puas.

Survey KPMG dalam Koletar (2003), faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan adalah menyalah gunakan jabatan dan adanya kebiasaan berjudi yang berkaitan dengan buruknya moral seseorang. Jadi, moralitas disini berkaitan dengan perilaku keserakahan (*greed*), penyalahgunaan jabatan (tidak berperilaku sesuai dengan pedomannya), dan kebiasaan berjudi seseorang yang akan mempengaruhi tingkat kecurangan.

Peranan moral yang baik dari seseorang pimpinan dan komitmennya yang kuat sangat mendorong tegaknya etika dalam suatu organisasi dan dapat dijadikan dasar bertindak dan suri tauladan bagi seluruh pegawai. Pimpinan tidak bias menginginkan etika dan perilaku yang tinggi dari suatu organisasi sementara pimpinan itu sendiri tidak sungguh-sungguh untuk mewujudkannya.

b. Jenis-Jenis Moral

Tarumingkeng (2001) dalam Arie Anggraini (2008) merangkum beberapa jenis moral yang dipetik dari berbagai sumber di internet (Tinjauan Ensiklopedia Filsafat) antara lain:

- 1) Moral *realism*, moral berdasarkan kondisi yang nyata/realitas.
- 2) Moral *luck*, moral yang dipengaruhi keberuntungan.
- 3) Moral *relativitism*, moral yang bersifat relative.
- 4) Moral *rational*, moral berdasarkan penggunaan akal sehat atau prosedur nasional.
- 5) Moral *scepticim*, moral yang menunjukkan sikap ragu-ragu karena tidak memberikan penilaian berdasarkan pengetahuan
- 6) Moral *personhood*, moral yang ditentukan berdasarkan kesadaran, perasaan dan tindakan pribadi atau merupakan bagian dari moral masyarakat. Moral masyarakat menyangkut semua yang memerlukan pertimbangan moral dalam hak-hak dan kewajiban.

c. Tahapan Moral

Dalam penelitiannya, Wilopo (2006) memuat bahwa Kohlberg (1969), sebagaimana dikutip oleh Velasquez (2002) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan prakonvensional, tahapan konvensional, dan tahapan postkonvensional (pasca konvensional).

Lebih lanjut lagi, Daft (2002) men

1. Prakonvensional
 - Mengikuti peraturan untuk menghindari hukuman
 - Bertindak untuk kepentingan sendiri
 - Kepatuhan dan kebaikan demi kebaikannya sendiri

2. Konvensional

- Berdasarkan harapan orang lain
- Memenuhi tugas dan kewajiban sistem social
- Menjunjung undang-undang

3. Pasca Konvensional

- Mengikuti prinsip keadilan dan hak yang dipilih sendiri
- Sadar bahwa orang-orang memiliki nilai yang berbeda dan mencari solusi yang kreatif atas dilema etika
- Keseimbangan atas kepedulian individu dan kebaikan secara umum

d. Pentingnya moral

Pentingnya moralitas bagi aparaturnya pemerintah, dalam hal ini lembaga legislatif dan eksekutif sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki moralitas dalam praktik pemerintahan dan birokrasi sehari-hari, karena moralitas memiliki hubungan untuk membentuk seseorang memiliki karakter tertentu, baik pola pikir maupun tindakannya. Dalam sejarah peradaban manusia bahwa suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar dan dihormati oleh bangsa lain karena bangsa itu dapat menjunjung moralitas bangsanya.

Kesadaran dalam menjunjung tinggi moralitas merupakan kewajibannya untuk mematuhi hukum adalah bukan karena takut pada sanksinya, akan tetapi sebagai kewajiban secara pribadi karena diyakini sebagai hal yang baik menurut hati nurani yang harus ditaatinya. Dalam

hal ini seseorang yang dapat menjunjung tinggi moralitas, akan dapat menyelenggarakan pemerintahan sebagai berikut:

1. Tidak akan terjadi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Melakukan fungsi pelayanan (service) dan sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang adil dan terbaik.
3. Melakukan empowering (pemberdayaan) untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
4. Melakukan pembangunan (development) untuk menciptakan kemakmuran masyarakat.
5. Sebagai pemegang komitmen terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel dan tidak korup.

e. Dampaknya Moral

Moralitas sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia, karena moral adalah merupakan kekuatan/standar untuk mempertimbangkan baik buruknya suatu tindakan manusia itu sendiri. Apabila moral dijunjung tinggi, maka apapun yang dilakukannya dapat diyakini hasilnya akan baik. Sebaliknya apabila nilai moral diabaikan, biasanya akan melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa mempertimbangkan baik buruknya dampak dari kegiatannya tersebut demi tercapai keinginannya.

Begitupun moralitas sangat berpengaruh terhadap tingkat kecurangan akuntansi mulai dari mekanisme penyusunan anggaran yang akan mempengaruhi perilaku bawahan yaitu mereka akan merespon positif atau negatif tergantung pada penggunaan anggaran. Bawahan dan atasan akan berperilaku positif apabila tujuan pribadi bawahan dan atasan sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya bawahan akan berperilaku negatif apabila anggaran tidak diadministrasikan dengan baik, sehingga bawahan dapat menyimpang dari tujuan organisasi. Perilaku ini merupakan perilaku bawahan yang mempunyai konflik dengan tujuan organisasi, hal ini terwujud pada perilaku manajer yang dengan sengaja membuat kecurangan akuntansi.

Banyak pembuat anggaran yang cenderung untuk menganggarkan pendapatan agak lebih rendah dan pengeluaran agak lebih tinggi dari estimasi terbaik, karena itu anggaran yang dihasilkan adalah target yang mudah dicapai. Apalagi jika prestasi seorang pemimpin dinilai dari prestasinya dalam mencapai anggaran yang telah ditetapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain penelitian Wilopo (2006), mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: studi pada perusahaan publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kecenderungan

kecurangan akuntansi diperusahaan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian internal di perusahaan, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi oleh manajemen perusahaan. Sedangkan moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi atau semakin tinggi tahapan moralitas manajemen semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadi.

Hasil penelitian Aviora (2008), yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Sumatera Barat, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian intern pada perusahaan maka akan mengurangi kecurangan pelaporan keuangan. Karena dengan efektifnya pengendalian intern dapat mendorong pihak manajemen perusahaan untuk tidak melakukan kecurangan pada pelaporan keuangan. Sedangkan motivasi berpengaruh secara signifikan positif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi negatif seseorang untuk berbuat kecurangan, maka semakin tinggi juga tingkat kecurangan pelaporan keuangan.

Selanjutnya moralitas manajemen berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini berarti bahwa

moralitas manajemen berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi di perusahaan. Moralitas yang tinggi yang dimiliki oleh seorang manajer mampu untuk menghindari manajer melakukan kecurangan pelaporan keuangan, karena seorang manajer bertindak untuk lebih mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan sendiri.

Nani (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, moralitas dan motivasi terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pada SKPD di kota Padang, memperoleh hasil sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pada SKPD di kota Padang, moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pada SKPD di kota Padang, dan motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pada SKPD di kota Padang.

Friskila (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Padang, memperoleh hasil ketaatan akuntansi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi, moralitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN di Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan moralitas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

C. Hubungan Antar Variabel Penelitian

1. Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Jensen and Meckling (1976) menjelaskan dalam teori keagenan bahwa pemberian kompensasi yang memadai ini membuat agen (manajemen) bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal (pemegang saham). Yaitu dengan memberikan informasi sebenarnya tentang keadaan perusahaan. Pemberian kompensasi ini diharapkan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut teori GONE dalam Simanjuntak (2008) terdapat empat faktor seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu : *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). *Opportunity* dan *Exposure* berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). Faktor generik berhubungan dengan organisasi yang berbuat kecurangan dapat dipengaruhi kesesuaian kompensasi.

Menurut Hasibuan (2005), kompensasi adalah semua pendapatan berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan karyawan. Menurut Amin (2009), salah satu faktor penyebab kecurangan akuntansi adalah insentif untuk melakukan kecurangan yaitu adanya porsi yang tidak signifikan dari kompensasi. Pemberian kompensasi terhadap pegawai dapat mengarah kepada perlakuan yang tidak semestinya terhadap kas. Seorang pegawai yang memiliki masalah keuangan bisa menyalahgunakan kas atau uang yang ada di tangannya. Sedangkan menurut Sawyer (2006), situasi ini dapat disebabkan oleh alasan keuangan yang dipengaruhi oleh kompensasi atau upah yang diterima, karena pengeluaran atau kerugian uang lainnya yang tidak dapat ditutupi oleh sumber daya keuangan yang normal dari individu tersebut. Kompensasi yang dibayarkan bisa membuat pegawai merasa tidak puas terhadap imbalan yang diberikan dan melakukan hal-hal yang dapat memberikan tambahan keuntungan terhadapnya dan berdampak terhadap laporan keuangan.

Hasil penelitian Wilopo (2006) memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, pemberian kompensasi yang sesuai pada perusahaan BUMN di Indonesia tidak secara signifikan menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi dari manajemen perusahaan.

Wilopo (2006) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang dapat memecahkan permasalahan kecurangan akuntansi adalah dengan memberi

kompensasi yang sesuai kepada agen, serta mengeluarkan biaya monitoring.

2. Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Teori keagenan (Jensen and Meckling) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul bila keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan juga disaat prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Bila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham). Keinginan, motivasi dan utilitas yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham.

Bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk mempertahankan jabatan dan lain-lain (Khang, 2002 dalam Wilopo, 2006). Demikian pula, bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki reputasi manajemen, serta ratio-ratio keuangan perusahaan (Scott, 2003 dalam Wilopo, 2006).

Hal ini juga terjadi di pemerintahan disaat proses penyusunan anggaran pemerintah daerah, teori keagenan berfokus pada persoalan asimetri informasi dimana eksekutif mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuan, yang berpotensi menciptakan moral hazard dan adverse selection, asimetri informasi terjadi karena legislatif tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja eksekutif, legislatif tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha eksekutif memberikan kontribusi pada hasil actual pada suatu organisasi pemerintahan

Bawahan memiliki informasi yang lebih banyak tentang kapabilitas produksi mereka dibandingkan atasan. Ditinjau dari perspektif keagenan, asimetri informasi ini memotivasi bawahan untuk memberikan informasi yang menyesatkan tentang kapabilitas produksi mereka. Schiff dan Lewin (1970) dalam Komala Sari (2004) mengatakan apabila atasan mengizinkan bawahan untuk berpartisipasi dalam penetapan anggaran, dapat digunakan sebagai alat menjaring informasi privat yang dimiliki bawahan. Dalam sektor publik asimetri informasi terjadi antara anggota legislatif (DPRD) dengan pemerintah.

Teori GONE dalam Simanjuntak (2008) juga megatakan faktor seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu *Opportunity* (kesempatan) dan *Exposure* (pengungkapan). *Opportunity* dan *Exposure* berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga

faktor generik/umum). Faktor generik berhubungan dengan organisasi yang berbuat kecurangan dapat dipengaruhi asimetri informasi.

3. Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Menurut Magnis-Susono dan Asri (2004), moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Magnis (2004) mengatakan bahwa sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Ia mengatakan moralitas sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah yang bernilai secara moral.

Amin (2009) menyatakan bahwa moral atau tingkah laku juga akan menjadi faktor pemicu kecurangan akuntansi. Adanya perubahan tingkah laku atau moral bias menjadikan seseorang menyalahgunakan kas/aktiva yang ada. Penyalahgunaan ini nantinya akan berusaha ditutupi melalui manipulasi terhadap laporan keuangan.

Menurut Bertens (1993), moralitas berasal dari kata sifat latin "moralis" mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan "moral". Moralitas yaitu suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi atau semakin tinggi tahapan

moralitas manajemen semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadi.

Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *greed* (keserakahan). Keserakahan merupakan bentuk moral seseorang yang jelek. Semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang.

Selain itu, menurut Koletar (2003), penyalahgunaan jabatan merupakan perilaku/moral yang tidak sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan adanya kebiasaan berjudi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan seseorang, dimana faktor ini secara langsung berkaitan dengan moral (perbuatan).

Berdasarkan penelitian Friskila (2010) dan Nani (2010), moralitas memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Apabila moral manajemen atau pegawai rendah, mereka akan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, dan nantinya untuk menutupi hal tersebut, mereka akan melakukan tindakan seperti memanipulasi data yang berkaitan dengan laporan keuangan.

D. Kerangka Konseptual

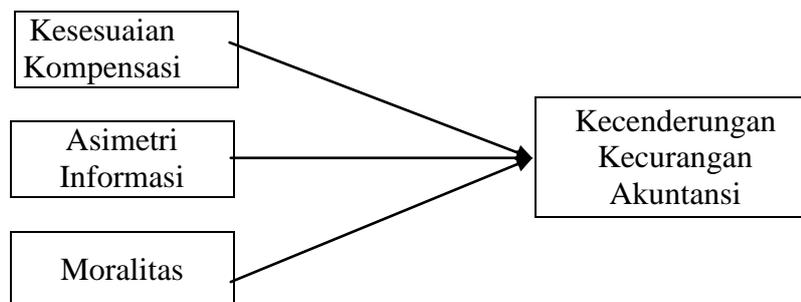
Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dari kajian teori yang telah dikemukakan di atas. Dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh kesesuaian kompensasi, asimetri informasi dan moralitas, terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah kota Padang.

Kesesuaian kompensasi mempengaruhi kecurangan akuntansi dengan kompensasi yang sesuai kecurangan akuntansi diharapkan dapat berkurang, individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi dan tidak melakukan perilaku kecenderungan berlaku curang dalam akuntansi demi memaksimalkan keuntungan pribadi.

Karena terjadinya asimetri informasi antara atasan dan bawahan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang bisa menyebabkan kecurangan. Disebabkan karena seharusnya laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya.

Moralitas berpengaruh terhadap tingkat kecurangan akuntansi. Dengan menyalahgunakan jabatan yang telah diberikan (tidak berperilaku sesuai dengan pedomannya) dan keserakahan (*Greed*) merupakan faktor pemicu kecurangan (*fraud*). Seseorang melakukan kecurangan di timbulkan karena adanya tekanan (*Pressure*) dalam diri seseorang (memiliki utang) dan adanya kebutuhan (*Need*).

Bertolak pada kajian di atas, maka untuk lebih jelasnya variabel-variabel yang menjadi objek pengujian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas dan didukung kajian teori, maka dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
- H2: Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
- H3: Moralitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi” adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian Kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi
2. Asimetri Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
3. Moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kesesuaian kompensasi, asimetri informasi dan moralitas para pegawai telah cukup baik, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada munculnya kecurangan akuntansi di pemerintah. Pemerintah harus melakukan penilaian yang lebih baik terhadap kinerja pimpinan atau kepala SKPD, kepala bagian, dan pegawainya. Selain itu

pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem kompensasi, moralitas pegawai dan memperhatikan seringnya terjadi perbedaan informasi khususnya dalam bidang akuntansi sehingga kecurangan akuntansi di pemerintah dapat terus dikurangi bahkan dapat dihilangkan.

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
3. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan dan menggunakan variabel lain, karena dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan dapat menjelaskan sebesar 28,9%. Sedangkan 71,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.